
MAKNA DAN PARTISIPASI POLITIK BAGI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN KONAWA SELATAN (STUDI KASUS PEMILU TAHUN 2024)

Dewi Anggaraini^{1*}, Asriani², Andika Saputra³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

andikasaputra1220@email.com

*Email Korespondensi: andikasaputra1220@email.com

Abstract :

Abstract: *The aim of this research is to determine the meaning and participation of politics for women in South Konawe district in 2024. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out directly using interview, observation, documentation and literature study methods. Data analysis uses data processing methods. Data checking (editing) Data grouping Data checking. The results of research on women's understanding and participation in the world of politics in South Konawe Regency are that women in the public sphere have a role in decision making. In fact, women can be strategic actors in regional development and women's involvement also plays a very extraordinary role in achieving equality for women in entering the world of politics, namely that women can participate and contribute to the political arena. Leadership participation is actually equal to that of men so that there is no longer any gender separation when trying and dedicating themselves to appropriate development, where currently women's representatives have obtained a role in public office in taking women's roles has increased in the political realm compared to regional Another thing that is evident from the government structure in South Konawe is that women dominate in taking important positions in the current government structure.*

Keywords: *Meaning, Participation, Women's Politics*

Abstrak :

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan di kabupaten konawe selatan tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode pengolahan data pengecekan (editing) data Pengelompokan data pemeriksaan data. Hasil dari penelitian pemahaman dan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Konawe Selatan yaitu masyarakat perempuan dalam ranah publik memiliki peranan dalam suatu pengambilan keputusan. Sejatinnya perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam suatu pembangunan daerah dan juga keterlibatan perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa berpartisipasi serta kontribusi dalam ajang perpolitikan. Partisipasi kepemimpinan secara nyata setara dengan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemisahan gender ketika berusaha dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan yang sesuai, yang dimana saat ini perwakilan perempuan telah mendapatkan suatu peranan di jabatan publik dalam pengambilan peranan perempuan sudah mempunyai peningkatan di ranah politik dibandingkan daerah lainnya yang terbukti dari struktur pemerintahan di Konawe Selatan yang dimana perempuan lebih mendominasi dalam pengambilan posisi penting dalam tatanan pemerintahan saat ini.

Kata Kunci: Makna, Partisipasi, Politik Perempuan

PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor, merubah kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk melekat politik atau dengan kata lain faham terhadap politik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia.

Indonesia memiliki negara yang berlatar belakang beragam suku bangsa, bahasa, dan agama memiliki beragam perlakuan pula terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan selalu ditempatkan pada kegiatan-kegiatan domestik sedangkan laki-laki pada kegiatan publik termasuk di bidang politik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat akhirnya diperjuangkan perempuan sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa aturan untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender. Padahal secara hakiki pemerintah Indonesia telah mengakui bahkan menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Undang-undang Dasar 1945 itu ternyata tidak cukup sehingga Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Hak Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada negara untuk menyusun peraturan khusus demi mempercepat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (Amalia dalam Amalia, 2012:238).

Sangatlah perlu untuk dilihat, bagaimana posisi perempuan dalam Negara Indonesia itu sendiri. Jikalau ditelusuri, kepedulian negara terhadap perempuan dapat dirunut sejak masa pemerintahan Presiden RI pertama, Soekarno. Pada masa itu, perempuan telah diakui haknya dalam politik, baik hak pilih dalam pemilihan umum 1955, maupun juga duduk sebagai anggota parlemen. Pada masa itu juga telah ada UU yang bernuansa keadilan gender, yaitu UU 80/1958. Undang-Undang tersebut menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam sistem penggajian. Keluarnya UU ini merupakan salah satu contoh dari keberhasilan perjuangan kaum perempuan ketika itu. Pada masa Soeharto ada juga kemajuan penting yang dicapai perempuan. Salah satu kemajuan yang dapat dicatat adalah dijadikannya masalah perempuan sebagai masalah politik dan adanya kebijakan-kebijakan publik yang secara eksplisit bertujuan untuk menangani masalah-masalah

perempuan. Secara kelembagaan hal ini tercermin dari adanya suatu kementerian yang bertugas menangani masalah-masalah. (Muhadjir M. Darwin, Negara Dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Grha Guru 2005, 71-72).

Sangat penting meningkatkan jumlah perempuan dalam dunia Politik terkhusus di Kabupaten Konawe Selatan, Karena ada tiga alasan utama pentingnya partisipasi kaum perempuan dalam dunia perpolitikan. Pertama, meningkatkan kesetaraan gender. Kedua, perempuan berfokus pada beberapa isu dan undang-undang yang mempengaruhi perempuan. Ketiga, politisi perempuan memiliki kepentingan simbolis. Dengan adanya perempuan dalam politik, maka akan bisa mengangkat kondisi perempuan itu sendiri yang saat ini masih termarginalisasi dalam beberapa aspek kehidupan. Karena sebetulnya perempuan sendiri yang tahu bagaimana masalah yang mereka hadapi.

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik sudah diatur dengan baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan didorong melalui tindakan afirmatif, sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan di partai politik (Parpol), lembaga legislatif maupun pada lembaga penyelenggara Pemilu. Makanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menekankan agar Parpol memerhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. (<https://kendaripos.fajar.co.id/2022/10/14/>).

Berdasarkan hasil perolehan dari KPU Kabupaten Konawe Selatan bahwa calon anggota legislatif perempuan belum mencukupi dari 30% dari setiap partai, sehingga KPU Kabupaten Konawe Selatan perlu menekankan kepada setiap parpol agar mendorong partisipasi perempuan dalam calon anggota legislatif pada pilcaleg tahun 2024 mendatang.

Keterwakilan perempuan dapat mencapai angka minimal 30% sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi angka tersebut perlu ditopang dengan tingkat pemahaman demi mencapai partisipasi perempuan di kancah ranah politik, melihat kondisi sekarang ini masih banyak kebijakan yang belum mengakomodir kebutuhan dan keamanan terhadap perempuan, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Makna Dan Partisipasi Politik Bagi Kaum Perempuan Di Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Pemilu Tahun 2024).” Sehingga melahirkan analisis dan rekomendasi akademis terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan di Kecamatan Andoolo, Angata dan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan sebagai berikut: peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan kurangnya pemahaman perempuan terkait makna politik, sebab kurangnya partisipasi perempuan dalam mengikuti sosialisasi politik, sehingga kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik.

Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah teknik purposive sampling dikarenakan Teknik ini akan memudahkan peneliti untuk menentukan informan yang benar-benar dapat memberikan data yang objektif dan relevan dengan penelitian ini. Selain itu dengan Teknik ini peneliti dapat lebih selektif dalam memilih informan penelitian. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yakni data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis datanya melalui kalimat atau kata-kata yang telah diklarifikasi guna melahirkan kesimpulan (Arikunto, 2006: 81). Dari analisis tersebut, peneliti berusaha mencari jawaban atas masalah yang telah dirumuskan agar dapat ditemukan pemecahannya sehingga dapat membuat kesimpulan yang sesuai dengan masalah yang ada pada latar belakang penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Politik Bagi Kaum Perempuan Di Kabupaten Konawe Selatan

Makna Politik pada hakikatnya adalah suatu proses yang melibatkan ide, gagasan dan perasaan seseorang tentang politik, jika seseorang memikirkan dan mendefinisikan suatu hal mengenai politik sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya maka hal ini dapat disebut sebagai makna politik. Jadi, ketika seseorang atau kelompok mendefinisikan atau menafsirkan suatu hal tentang politik maka ini akan disebut makna politik bagi individu atau kelompok tersebut. Politik dalam pandangan Peter Mehl (Budiarjo 2007: 15) dapat dipahami bahwa aktor politik merupakan aktor utama dalam kegiatan politik untuk melakukan usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Selain itu, aktor politik juga sebagai aktor utama yang berpotensi untuk menampilkan politik dalam bentuk buruk dalam kegiatan politik.

Pada dasarnya makna politik dapat diartikan sebagai pandangan, perasaan dan pendapat akan politik oleh seseorang maupun kelompok yang dalam proses melahirkan makna politik tersebut dipengaruhi oleh pemikiran, dan perasaan akan kondisi politik yang terjadi dilingkungannya, serta dari daerah-daerah lainnya.

Politik Dalam Pandangan Positif

Politik sendiri akan selalu melekat dengan negara sebab definisi utama politik memang adalah pengetahuan yang berhubungan dengan aspek kenegaraan baik itu dari aspek sistem, dasar, kebijakan dan lain sebagainya. Politik juga merupakan jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta politik bertujuan memberikan kesejahteraan bagi semua aspek. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dari Ibu Maulana (35 Tahun) masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya politik itu adalah salah satu cerminan demokrasi yang di lakukan di negeri Indonesia khususnya untuk memilih salah satu figur atau calon baik itu kepala desa, bupati, gubernur serta presiden, artinya politik itu seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk kita menyumbang suara kita di dalam pemilihan tersebut” (Wawancara, 15-10-2023).

Dari hasil wawancara di atas dengan Ibu Maulana memaknai politik sebagai suatu hal yang positif, bahwa politik itu adalah yang berkaitan suatu sistem demokrasi, yang ada di negeri Indonesia ini, dalam sistem politik demokrasi salah satunya seperti adanya pemilu, yang dimana merupakan pemilu adalah instrumen penting menegakkan demokrasi di suatu negara, sebab legitimasi kekuasaan harus diperoleh melalui pemilu, agar dapat bisa melahirkan pemimpin yang bijaksana.

Seperti yang dikatakan informan ibu Juniati (37 tahun) masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, yang mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya politik adalah salah satu jalur atau ruang yang tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi dirinya, sikapnya, pikirannya, dan ideologinya untuk memperjuangkan kebaikan agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik” (wawancara, 15-10-2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Juniati memaknai politik sebagai suatu hal yang positif, bahwa politik itu adalah jalur untuk masyarakat dalam melakukan kepada dirinya, sikapnya, pikirannya, dan ideologinya untuk menciptakan suatu kebaikan sehingga dapat menghasilkan kehidupan masyarakat yang positif dan menjadi warga negara yang lebih baik.

Hal yang paling mendasar dalam buruknya citra politik tidak lain hanyalah praktik terhadap pelaksanaannya, dalam hal ini yaitu pelaksanaannya tidak sesuai makna dan tujuan politik itu sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk kebahagiaan bersama, bukan individu tertentu. Masyarakat tentu dapat melihat dan menilai langsung citra buruk politik sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dengan

*“Menurut pandangan saya bahwa orang-orang yang terjun dalam dunia politik tidak pernah jauh dari korupsi, penghianatan, dan saling menjatuhkan, walaupun ada orang terjun ke dunia politik dengan tujuan baik, pasti lawan-lawannya banyak yang tidak suka dan saling berusaha untuk menjatuhkannya. Ada juga orang yang terjun dalam dunia politik yang tujuan awalnya baik tapi malah tergiur juga dengan uang dan akhirnya memimpin dengan semena-mena, dan juga awalnya kita lihat orang itu baik pas mau pemilihan, tapi akhirnya berkhianat, lalu melupakan janji-janjinya” (Wawancara, 15-10-2023).*ibu Rosmin (35 Tahun) masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, yang mengungkapkan bahwa:

Dari hasil wawancara di atas dengan ibu Rosmin dia lebih ke memaknai politik sebagai suatu hal yang negatif, bahwa aktor politik yang terjun ke dalam dunia politik cukup lumayan banyak yang terjerat kasus korupsi, penghianatan, dan perebutan kekuasaan sehingga dengan itu aktor politik saling menjahtuhkan lawan politik dengan berbagai cara yang akan dia lakukan.

Seperti yang dikatakan informan ibu Risnawati (39 Tahun) masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.

Menurut saya politik itu dapat menimbulkan perpecahan baik dari individu maupun kelompok masing-masing, karna di dalam politik itu mereka saling menjatuhkan untuk mendapatkan kekuasaan. Saya juga melihat bahwa kebanyakan hanya janji palsu saja yang dilakukan oleh aktor-aktor politik ini, sehingga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik membuat saya ragu dan takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.” (Wawancara, 15-10 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Risnawati, dapat disimpulkan bahwa lagi dan lagi masyarakat sebagian kaum perempuan memaknai politik suatu hal yang negatif, karena politik dapat menimbulkan perpecahan dikarenakan bahwa aktor yang terjun dalam dunia politik akan saling menjatuhkan satu sama lain dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan.

Melihat teori dan hasil wawancara, dapat di simpulkan bahwa dari beberapa kaum perempuan masih memaknai politik dengan hal negatif seperti yang di sampaikan oleh Peter Mehl bahwa politik akan dipandang positif jika aktor dari politik berusaha mencapai kebaikan bersama dalam tindakannya mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sementara itu, politik akan di pandang negatif jika aktor politik hanya memperebutkan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Persepsi politik di pandang secara negatif menjadi sangat tinggi dibandingkan politik di pandang secara positif oleh masyarakat, karena aktor

politik saat ini di anggap tidak menjalankan kekuasaan dan wewenangnya dengan baik. Apabila politik dijalankan dengan baik dan sejalan dengan tujuannya, maka politik otomatis akan di pandang positif. Akan tetapi, jika politik tidak digunakan dengan baik dan menjauhi tujuan dari politik yang seharusnya, maka politik akan di pandang sebagai suatu hal yang buruk.

Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan

Rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam mengambil peran di ranah publik, Perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik, disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya patriarki lebih mengutamakan kaum laki-laki jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Kaum perempuan merasa didiskriminasi dan kurang dipercayai untuk maju ke panggung politik, hal inilah yang menyebabkan partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Sebagian besar posisi strategis dalam dunia politik selalu diduduki oleh kaum laki-laki., seperti partisipasi perempuan di parlemen, dalam penyelenggara politik pun masih kurang adanya keterwakilan perempuan pada sekarang ini dapat dilihat masih banyak daerah yang minim akan adanya perempuan yang ikut berperan aktif dalam ranah publik, padahal Perempuan dalam mengambil peran di ranah politik sangatlah penting mengingat memperjuangkan hak-hak mereka serta memahami keinginannya adalah perempuan itu sendiri. Maka dari itu sangat penting juga bagi perempuan mengambil peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan.

Pada dasarnya perempuan telah mendapatkan suatu peranan di jabatan publik yang dimana saat ini sedikit demi sedikit perwakilan perempuan dalam pengambilan peranan sudah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, serta partisipasi perempuan di daerah-daerah lainnya mengalami kemajuan di ranah publik.

a) Aspek Akses

Aspek akses, dalam aspek ini yaitu pengakuan, peluang, dan jaminan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pilihan. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dengan ibu Meiyanti, S.IP calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan. Angata, Kecamatan.

b) Aspek Kontrol

Aspek Kontrol dalam aspek ini yaitu, kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dengan ibu Meiyanti, S.IP Calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan. Angata, Kecamatan. Benua, Kecamatan. Basala, dan Kecamatan. Andoolo Barat) dari Partai Keadilan Sosial (PKS).

- Aspek Suara Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan (*Policy Making Process*).

Aspek suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*Policy Making Process*). dalam aspek ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini keterwakilan suara perempuan dalam parlemen pada proses pembuatan kebijakan masih sangat kurang. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dengan ibu Meiyanti, S.IP calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan Angata, Kecamatan Benua, Kecamatan. Basala dan Kecamatan Andoolo Barat) dari Partai Keadilan Sosial (PKS), menuturkan bahwa: “Tujuan saya setelah terpilih pada pemilu 2024, saya dapat membawa aspirasi, karna saya hadir sebagai kuota perempuan, tentu tujuan saya dapat membawa aspirasi para perempuan-perempuan di daerah saya. Mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik bagaimana kita selalu memberikan dorongan semaksimal mungkin, meyakinkan bahwa penting bagi mereka untuk terjun dalam ranah publik. Dalam kebijakan pemerintah sangat jelas mendukung perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sampai-sampai pemerintah mengeluarkan UU mengenai keterwakilan perempuan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara, kehadiran perempuan dalam sebuah lembaga legislatif sangat diperlukan demi terciptanya keterwakilan suara perempuan dalam lembaga

legislatif untuk kemudian diakomodasi dalam sebuah kebijakan. Hal ini menandakan bahwa ruang agar perempuan ikut berpartisipasi terkhusus di Kabupaten Konawe Selatan, saat ini melakukan suatu proses pencapaian yang lebih dari apa yang pemerintah harapkan tetapi meskipun seperti itu perempuan dalam politik menjadi penting sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan serta turut dalam proses pembangunan. Sementara dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan cara memberikan ruang, dukungan, motivasi dan wadah kepada perempuan untuk membangun serta memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka sehingga rasa keinginan mereka untuk terjun pada dunia politik selalu ada sehingga mewujudkan kebijakan sensitif gender. disisi lain penggunaan strategi yang mereka gunakan untuk duduk dalam suatu tatanan tinggi perlu adanya pendekatan kepada orang yang mempunyai pengaruh cukup besar di dalam suatu daerah, membangun jejaring serta membangun hubungan dengan siapapun yang bisa membantu mendorong karena kita tidak bisa seketika duduk disuatu jabatan tanpa adanya dorongan dari segala pihak.

KESIMPULAN

Makna politik bagi kaum perempuan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan maka dapat diambil kesimpulan: Bahwa kaum perempuan yang memaknai politik secara negatif dikarenakan melihat dari beberapa aktor politik yang menjalankan suatu kegiatan politik dengan cara yang tidak bermoral, sedangkan kaum perempuan yang memaknai politik secara positif melihat bahwa secara samar-samar usaha untuk mencapai kebaikan bersama dalam praktek politik itu tetap ada diantaranya banyaknya praktek politik yang tidak bermoral. Sebagian kaum perempuan melihat aktor politik dipandang tidak berusaha untuk memajukan bangsa, konstitusi dianggap telah bagus tetapi tidak menjalankan dengan baik oleh aktor politik dalam tindakan politiknya, lembaga tinggi negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan benar, dan pejabat sering kali korupsi dan mempertahankan atau merebut kekuasaan dengan segala cara. Sebaliknya, praktek politik dengan upaya mencapai kebaikan bersama dalam bangsa adalah segala upaya untuk memajukan bangsa, dengan tidak melanggar konstitusi dalam tindakan-tindakan politik, lembaga perwakilan rakyat menjalankan kinerjanya dengan baik, agar dapat mewakili kepentingan rakyat dan pejabat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta perebutan kekuasaan dilakukan secara demokrasi dan formal yang tidak dimanipulasi agar dapat tidak merugikan orang lain.

Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bisa seimbang dengan laki-laki yang secara masif dominan menduduki jabatan politik. Namun, beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik legislatif dan eksekutif. Ini karena adanya beberapa faktor masih mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, seperti budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat yang memperkuat semua aspek kehidupan politik, terutama di lembaga-lembaga tertinggi sebagai pembuat kebijakan. Peran laki-laki menjadi dominan dalam bidang politik di lembaga eksekutif maupun legislatif. begitu banyak hambatan-hambatan perempuan yang mereka alami pada saat keikutsertaan perempuan dalam parlemen, tapi sejatinya perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam suatu pembangunan daerah dan juga keterlibatan perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa, dalam mencapai kesetaraan oleh perempuan dalam terjun ke dunia politik yaitu perempuan bisa berpartisipasi serta berkontribusi dalam ajang perpolitikan. Peran perempuan secara nyata setara dengan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemisahan gender ketika berusaha dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kadek Anggi Putri Kori. Makna Politik Dalam Iklan Komersial di Media Sosial (Analisis Semiotika Iklan Gojek versi Aji Mumpung). Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Ani Soetjipto, 2011, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Jakarta.
- Arifulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* , 2015: 301-311.
- Arikunto dan Suharsimi 2010 Manajemen Penelitian, Jakarta.
- Bakti, C.P. 2012, 'Optimasi produksi enzim selulase dari *Bacillus* sp. BPPT CC RK2 dengan variasi pH dan suhu menggunakan response surface methodology', Skripsi, Program Studi Teknologi Bioproses Universitas Indonesia, Depok.
- Budiardjo, Miriam. "Dasar-dasar Ilmu Politik." . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darwin, Muhadjir M. "Negara Dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik." Yogyakarta: Grha Guru 2005, 2005.
- Dedeek Adek R. (2016). Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik. *Intizar*. Vol. 22 (2). Hlm: 321-322
- Faulks, K. (2010). Sosiologi politik. Bandung: Nusa Media.
- Halim, Rahmawati, et al. Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik. Vol. 1. SAH MEDIA, 2016.
- Husain, M. N., & Iba, L. (2023). STRATEGI POLITIK KEMENANGAN RUSMAN EMBA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(2), 90-96.
- Husain, M. N., & Zuada, L. H. 2021. Money Trumps Ethnicity: An Overview of Local Election in Kendari. *Jurnal Politik*, 7(1), 1.
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131.
- Husain, M. N., Zuada, L. H., & Anggraini, D. 2021. Political Primordialism Post-Reformation in Indonesia. *Proceedings of the First International Seminar Social Science, Humanities and Education*. In ISSHE
- Husain, M. Najib. 2023. Jalan Panjang Menuju Kursi Pemimpin Daerah (Kajian Komunikasi Politik). CV. Literasi Indonesia. Kota Kendari
- Ibiyinka Olusola Adesanya. (2014). Deborah: A paradigm for christian women's active participation in Nigerian Governance. *Feminist Theology*. Vol. 22. (3). Hlm: 305-306.
- Jejen, La. "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 1.1 (2022): 36-42.
- Kartono Kartini. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju
- Kiftiyah, Anifatul. "PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, Desember 2019, 2019: 55-72.
- Kollo, Fredik L. "Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik." *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598* (2017): 5973.
- Lahaji, Lahaji, and Sulaiman Ibrahim. "Fiqh Perempuan Keindonesiaan." *Al-Bayyinah* 3.1 (2019): 1-14.
- M. Chowdhury and M. K. Kundu. Comparative assessment of efficiency for content based image retrieval systems using different wavelet features and pre-classifier. *Multimedia Tools and Application*, 74(24):11595--11630, 20
- Mekl, Peter H. *Political Continuity and change*. New York: Harper and Row 1967

- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara, 2001.
- Mulyana, Leviane Jackelin Hera Lotulung1 dan Deddy. "Perempuan dalam politik di Sulawesi utara." *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* , 2018: 138-144.
- Naqiyah. (2005). *Otonomi-Otonomi Perempuan*. Yogyakarta: Bayu Media Publising.
- Ni Putu Lia Mahayani. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana. *e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Goodyear Publishing Co.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung : Remadja Rosda Karya
- Nurchahyo. A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*. Vol. 6 (1). Hlm : 25-27.
- Oktaviani A. S. (2011). Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal. *Pluralitas Agama Dalam Keluarga Jawa*, 3(1), 92–102. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>
- Pasha, Sasya Asita. *Makna Politik Bagi Politisi Perempuan Berdasarkan Lokasi Sosial*. Diss. Universitas Airlangga, 2010.
- Pranoto, H. (2015) *Reliability Centered Maintenance*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastiwi, Mardijani. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa." *Buletin Ekonomi* 8.1 (2012): 1-8.
- Puluhuluwa, Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto. "memahami tentang beberapa konsep politik ." 2005: 262-285.
- Rahman, Asmika. "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan." Rahman, A.(2018), 2018: 44-61.
- Saputra, Herdin Arie, Dyah Mutiarin, and Achmad Nurmandi. "Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019." *Muwazah* 12.1 (2020): 89-110.
- Sri Soemantri, Peningkatan Perlindungan Hukum Dalam PJPT II Melalui Hak Asasi Manusia, *Jurnal Era Hukum* No 2 Th 5 Oktober 1998
- Susanti. (2015). Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Riau tahun 2013 (Studi kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Jom FISIP*. Vol. 2. (2). Hlm: 1-18
- Wahid, A. (2013) *Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta : CV Sagung Seto
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1.1 (2018): 63-83.
- Zulfikar, Achmad. "Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik." (2018).